

## UPAYA PENANGGULANGAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI WILAYAH KOTA MATARAM

Nurfitrianiingsih\*, Maulina Garim Nugraha, Endry Gunawan, Siti Atika Rahmi  
Rahmad Hidayat, Muhammad Aprian Jailani

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram

\*Email: nutfitrianiingsihdompu@gmail.com

Naskah diterima: 29-05-2025, disetujui: 27-06-2025, diterbitkan: 30-06-2025

DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/jppm.v8i3.9205>

**Abstrak** - Permasalahan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Mataram merupakan isu sosial yang kompleks dan terus berkembang seiring urbanisasi. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini bertujuan untuk mengkaji peran Dinas Sosial Kota Mataram dalam menangani gepeng melalui pendekatan humanis, rehabilitatif, dan preventif. Salah satu program unggulan yang dikaji adalah GIGI PEMULA (Giat Pagi Pengawasan Pemulung dan Pengemis), yang dilaksanakan secara rutin dengan fokus pada penertiban, edukasi, asesmen sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi kegiatan lapangan yang melibatkan pemetaan titik rawan gepeng, penyaluran bantuan sosial berbasis keluarga, dan pemberdayaan kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa strategi penanggulangan yang bersifat kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas program dan memperkuat integrasi sosial kelompok marginal. Model intervensi ini diharapkan menjadi acuan bagi daerah lain dalam membangun solusi sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** gelandangan, pengemis, dinas sosial, praktik kerja lapangan

### LATAR BELAKANG

Masalah gelandangan dan pengemis (gepeng) merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks yang terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan perkotaan. Kota Mataram sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menjadi magnet urbanisasi yang tidak terkendali. Salah satu dampak dari urbanisasi tersebut adalah meningkatnya jumlah gepeng di perkotaan. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah karena berdampak langsung pada ketertiban umum, kebersihan lingkungan, dan kenyamanan masyarakat.

Menurut Ramadhan (2024) gelandangan dan pengemis sering dianggap sebagai kelompok marginal yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tempat tinggal yang layak, dan akses terhadap pelayanan sosial dasar. Dalam banyak kasus, mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural dan minimnya

keterampilan hidup. Oleh karena itu, keberadaan gepeng tidak hanya menjadi masalah estetika kota, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem sosial dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok rentan. Masalah ini perlu ditangani secara serius dan berkelanjutan melalui upaya-upaya yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif dan preventif (Mahdiyah, 2023).

Dinas Sosial sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang kesejahteraan sosial memiliki peran penting dalam menangani masalah gepeng (Fauzi et al., 2025). Salah satu tanggung jawabnya adalah merancang dan melaksanakan kebijakan dan program yang komprehensif untuk menanggulangi gepeng (Mulyati et al., 2022). Upaya-upaya tersebut meliputi kegiatan penjangkauan, pendataan, pembinaan di rumah singgah, pelatihan keterampilan, dan pemberian bantuan sosial. Program-program tersebut bertujuan untuk

mengubah pola hidup gepeng agar dapat hidup mandiri dan produktif di tengah masyarakat.

Variabel utama dalam kegiatan PKL ini adalah penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan penanganan gelandangan dan pengemis sebagai objek kebijakan sosial. Fokus utama diarahkan pada strategi, efektivitas, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program yang telah berjalan (Lailiyah et al., 2025). Kegiatan PKL ini juga mencakup analisis dampak program terhadap kehidupan gelandangan, serta sejauh mana kontribusi kebijakan tersebut dalam mengurangi jumlah gelandangan di wilayah Kota Mataram. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi menjadi salah satu aspek penting yang dikaji dalam kegiatan PKL ini untuk mendorong solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Kegiatan PKL ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memberikan kontribusi nyata dari kalangan akademisi dalam mendukung program-program pemerintah, khususnya di bidang kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis data lapangan, kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Melalui observasi, wawancara, dan diskusi kelompok, PKL ini mengkaji program-program yang telah dilakukan untuk menanggulangi gepeng dan mengevaluasi efektivitas dan kendalanya.

Hasil dari kegiatan PKL ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi Dinas Sosial dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program sosial. Selain itu, output dari kegiatan ini juga dapat memperkuat landasan argumentatif untuk mendorong perumusan kebijakan sosial yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Dalam jangka panjang, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama terciptanya

solusi yang berkelanjutan bagi permasalahan gepeng jalanan.

Dengan demikian, kegiatan PKL ini tidak hanya berkontribusi pada penyelesaian masalah sosial secara langsung, tetapi juga memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial. Sinergi antara institusi pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun tatanan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Pendekatan holistik dan kolaboratif yang dilakukan dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model penanganan spon yang efektif dan dapat direplikasi di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengenai gelandangan dan pengemis dilaksanakan di kota mataram, pada bulan february hingga April. Kegiatan diawali dengan Observasi lapangan, dan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh gelandangan dan pengemis yang ada di kota mataram. Langkah yang diambil pemerintah kota mataram dalam menangani kasus gelandangan dan pengemis yang ada di kota mataram dapat meliputi kegiatan GIGI PEMULA Yang bekerja sama dengan pihak Satgas sosial dengan tujuan untuk tidak mengemis dijalan raya dan Pihak Dinas sosial juga memberikan bantuan kepada PMKS (Penyandang masalah kesejahteraan Sosial).

GIGI PEMULA (Giat pagi pengawalan pemulung dan pengemis) Merupakan inisiatif dari dinas sosial kota mataram yang bertujuan untuk menertibkan dan menangani permasalahan gelandangan, pengemis, dan pemulung di wilayah kota mataram, Program ini di laksanakan secara rutin pada jumat pagi hari, dengan pendekatan humanis dan terkoordinasi bersama pihak terkait. Adapun fokus program ini: 1. Menjaga ketertiban umum

yang bertujuan dapat mengurangi keadaan gelandangan dan pengemis di ruang publik yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama pada saat bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. 2. Melindungi kelompok rentan yang bertujuan untuk dapat mencegah eksploitasi terhadap anak-anak dan lansia yang sering kali terlibat dalam aktivitas pengemis.

Sedangkan tahap sosialisasi terdiri dari beberapa langkah pelaksanaan antara lain yaitu: a) Identifikasi dan Penertiban: Petugas melakukan patroli di titik-titik rawan yang telah dipetakan sebelumnya untuk menertibkan gelandangan dan pengemis. b) Pendataan dan Asesmen: Mereka yang terjaring didata dan dilakukan asesmen untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. c) Rehabilitasi dan Pembinaan: Bagi yang membutuhkan, diberikan layanan rehabilitasi sosial dan pembinaan agar dapat kembali berfungsi sosial secara normal. d) Pemberdayaan Ekonomi: Dinas Sosial juga berupaya memberikan pelatihan dan bantuan ekonomi agar mereka dapat mandiri secara finansial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Sosial Kota Mataram menunjukkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) dilakukan melalui pendekatan humanis dan rehabilitatif. Mahasiswa ditempatkan di bagian Rehabilitasi Sosial, di mana keterlibatan mereka bukan hanya dalam aspek administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan. Pada bulan pertama, kegiatan difokuskan pada pendataan dan verifikasi lansia penerima bantuan sosial berupa beras 5 kg, selimut, tikar, sarung, dan kursi roda. Verifikasi ini dilakukan bersama Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dengan tujuan memastikan bantuan diterima oleh yang benar-benar berhak. Proses ini mencerminkan bahwa penanganan

sosial harus dimulai dari validasi data yang akurat untuk memastikan efektivitas intervensi.

Data lapangan menunjukkan bahwa sebaran gepeng di Kota Mataram tidak merata. Berdasarkan rekapitulasi Dinas Sosial tahun 2024, tercatat 25 orang gepeng yang tersebar di enam kecamatan. Kecamatan Selaparang memiliki jumlah tertinggi dengan 9 orang, diikuti oleh Ampenan sebanyak 8 orang, dan Sandubaya sebanyak 7 orang. Kecamatan Mataram hanya mencatat 1 orang gepeng, sementara Cakranegara dan Sekarbela tidak ditemukan adanya gepeng. Perbedaan ini menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi yang tinggi, seperti terminal dan pasar, lebih rentan menjadi lokasi aktivitas mengemis. Hal ini memperkuat pandangan bahwa faktor lingkungan turut memengaruhi penyebaran masalah sosial.

Pendekatan yang digunakan oleh Dinas Sosial dalam penanganan gepeng dilakukan secara persuasif dan edukatif. Salah satu kegiatan dilaksanakan di sekitar SPBU Jalan Majapahit, di mana tim dari Dinas Sosial bersama mahasiswa PKL melakukan interaksi langsung dengan para pengemis. Mereka diberikan edukasi mengenai risiko mengemis di pinggir jalan serta diarahkan untuk mengikuti program rehabilitasi sosial. Hasil dari pendekatan ini cukup positif, karena beberapa individu bersedia menjalani asesmen lebih lanjut. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan non-represif lebih efektif membangun kepercayaan dan membuka peluang integrasi sosial.

Langkah asesmen dilanjutkan di wilayah Jalan Langko terhadap seorang lansia yang rutin mengemis. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa motif mengemis bukan hanya karena faktor ekonomi, melainkan juga keterbatasan fisik dan tidak adanya dukungan keluarga. Kondisi ini menegaskan bahwa gepeng merupakan bagian dari kelompok

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga membutuhkan penanganan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing individu.

Selain penanganan langsung, Dinas Sosial juga melakukan upaya preventif melalui penyaluran bantuan sosial berbasis keluarga. Di Jalan Airlangga, bantuan berupa sembako dan perlengkapan tidur disalurkan kepada keluarga rentan yang tinggal di kawasan padat dan kumuh. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencegah munculnya praktik eksploitasi terhadap anak dan perempuan dalam aktivitas mengemis. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya mencegah masalah sejak dari akar, yakni kondisi ekonomi dan sosial keluarga.

Kegiatan pemberdayaan juga diarahkan kepada lansia dan penyandang disabilitas. Di kawasan Jalan Lestari, bantuan berupa kursi roda dan sembako disalurkan kepada individu yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Pemberian bantuan semacam ini bukan hanya bersifat karitatif, tetapi juga strategis untuk mencegah munculnya gepeng baru akibat keterbatasan akses layanan.

Secara keseluruhan, hasil PKL menunjukkan bahwa penanganan gepeng membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan asesmen sosial, pemberian bantuan, edukasi, serta pemberdayaan. Keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi antara Dinas Sosial, masyarakat, aparat kelurahan, serta institusi pendidikan yang melibatkan mahasiswa. Kegiatan PKL ini juga memperkuat posisi perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial, yang tidak hanya berkontribusi secara akademik, tetapi juga secara praktis dalam merumuskan solusi sosial berbasis kebutuhan lokal.

Kegiatan PKL ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kota Mataram, dalam

penanganan masalah sosial terkait keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di perkotaan. Permasalahan gepeng tidak hanya mencerminkan persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan dimensi sosial, kesehatan, dan keterbatasan akses terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan partisipatif.

### 1. Pendekatan Humanis dalam Penjangkauan Gelandangan dan Pengemis

Kegiatan awal dilakukan di sekitar SPBU Jalan Majapahit, Kota Mataram, dengan tujuan menjangkau individu-individu yang terindikasi sebagai pengemis. Pendekatan dilakukan secara humanis oleh tim dari Dinas Sosial bersama mitra PKL. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menertibkan, namun juga memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai program-program rehabilitasi sosial yang tersedia.



**Gambar 1.** Edukasi kepada pengemis di sekitar SPBU di Jalan Majapahit

Melalui interaksi tersebut, beberapa individu menunjukkan kesediaan untuk mengikuti proses asesmen lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan non-represif lebih efektif dalam membangun kepercayaan dan memfasilitasi integrasi sosial bagi kelompok marjinal.

## 2. Asesmen Kebutuhan dan Latar Belakang Sosial Ekonomi

Langkah selanjutnya dilakukan di daerah Jalan Langko, dimana tim melakukan asesmen terhadap seorang perempuan lanjut usia yang secara rutin melakukan kegiatan mengemis. Melalui pendekatan empatik, diketahui bahwa motivasi utama individu tersebut tidak hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga keterbatasan fisik dan kurangnya akses terhadap layanan sosial dasar.



**Gambar 2:** Interaksi dan asesmen awal dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jalan Langko

Temuan ini menunjukkan bahwa program intervensi harus bersifat adaptif dan mempertimbangkan kondisi spesifik setiap individu agar penanganan lebih tepat sasaran.

## 3. Penyaluran Bantuan Sosial Berbasis Keluarga

Di kawasan Jalan Airlangga, tim melakukan kegiatan penyaluran bantuan sosial berupa sembako dan perlengkapan tidur kepada keluarga rentan yang teridentifikasi tinggal di kawasan padat dan kumuh. Aksi ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk mengurangi risiko eksploitasi anak dan perempuan dalam kegiatan mengemis.



**Gambar 3.** Pemberian bantuan sosial kepada keluarga rentan di Jalan Airlangga

Program ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis keluarga untuk memutus rantai kemiskinan dan marjinalisasi sosial yang sering kali melatarbelakangi kemunculan gepeng di perkotaan.

## 4. Pemberdayaan Lansia dan Penyandang Disabilitas

Sebagai bagian dari penanganan kelompok rentan, kegiatan juga menyasar lansia dan penyandang disabilitas melalui kunjungan langsung ke warga di kawasan Jalan Lestari. Tim PKL menyalurkan bantuan berupa kursi roda dan pakaian kepada individu yang tidak memiliki kemampuan fisik untuk bekerja.



**Gambar 4.** Pembagian kursi roda dan sembako kepada warga lansia penyandang disabilitas di Jalan Lestari

Langkah ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan munculnya gepeng tidak hanya

dilakukan di ruang publik, tetapi juga dengan memastikan kelompok rentan memiliki akses terhadap layanan dan bantuan yang mereka butuhkan.

#### 5. Implikasi Sosial dan Strategi Penanggulangannya

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Mataram membutuhkan pendekatan multidimensi. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak hanya sebatas penertiban, tetapi juga mencakup pendidikan, pemberdayaan, dan pemulihan sosial. Variabel utama dalam kegiatan ini adalah intervensi sosial melalui pendekatan yang humanis dan partisipatif, sedangkan variabel kedua adalah pemulihan kesejahteraan melalui penjangkauan, asesmen, dan pendampingan secara terpadu.

Dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi kegiatan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program penanganan gepeng sangat ditentukan oleh kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan perguruan tinggi sebagai pelaksana kegiatan PKL. Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan kota yang lebih inklusif dan terbebas dari praktik mengemis dan gelandangan yang meresahkan.



Gambar 5. Penarikan PKL mahasiswa Muhammadiyah Mataram

### KESIMPULAN DAN SARAN

Melalui hasil kegiatan PKL dapat disimpulkan bahwa penanganan gelandangan

dan pengemis (gepeng) di Kota Mataram memerlukan strategi yang komprehensif dan berorientasi pada pendekatan humanis. Dinas Sosial Kota Mataram telah melakukan berbagai upaya yang meliputi penjangkauan langsung, asesmen kebutuhan individu, penyaluran bantuan sosial berbasis keluarga, dan pemberdayaan kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam membangun kepercayaan dan memfasilitasi integrasi sosial, dibandingkan dengan pendekatan represif semata. Selain itu, hasil kegiatan menunjukkan bahwa permasalahan gepeng tidak semata-mata terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut faktor sosial, kesehatan, dan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar.

Lebih lanjut, keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan gepeng bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan partisipasi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam menciptakan kebijakan sosial yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lokal. Kegiatan PKL ini tidak hanya berkontribusi secara langsung dalam penanganan masalah sosial, tetapi juga memperkuat peran akademisi sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, model intervensi sosial yang diterapkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat direplikasi di daerah-daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa, guna mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Kami menyampaikan Terima kasih yang sebesar besarnya terhadap Program Studi Ilmu Administrasi publik, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Muhammadiyah mataram atas dukungan akademik dan fasilitas

yang di berikan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan. dan Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dinas Sosial Kota Mataram atas kerja sama, keterbukaan informasi, dan partisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan PKL ini. Sinergi antara institusi pendidikan dan instansi pemerintah merupakan elemen penting dalam mewujudkan pelaksanaan PKL yang bermakna dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, L. M., Jenderal, U., Yani, A., & Sosial, D. (2025). *Peran Dinas Sosial dalam Menaggulangi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( Pmks ) di Kota Bandung*. 02(01).
- Hairani Siregar, Fajar Utama Ritonga, R. P. K. S. (2022). Penanganan Anak Jalana di Kota Medan Menggunakan Sistem Pelayanan Panti dan Non Panti. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 10, 13–20.
- Idza, A. A. (2023). Gelandangan Dan Pengemis Dalam Konteks Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. *Jurnal Tatapamong*, 145-161.
- Lailiyah, I., Wulandari, R., & Anam, M. S. (2025). *Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kemiskinan Di Kabupaten Jember Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara*. 1(2015), 683–690.
- Mahdiyah, N. (2023). Studi Literatur Kebudayaan Kemiskinan Pada Pengemis Di Perkotaan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 47.
- Marpaung, A., Simanullang, R., Saragih, B., Sinaga, E., & Batu Bara, D. (2022). Analisis Faktor Penyebab Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45-58.
- Mulyati, Y., Ridwan Caesar, M., Purnama, E., Studi, P., & Negara, A. (2022). Analisis Manajemen Strategi Program Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. *Res Publica*, 1(1), 49–60.
- Ramadhan, R. (2024). STIGMA DAN KAPITALISASI KEMISKINAN: STUDI KEHIDUPAN SOSIAL KOMUNITAS PENGEMIS DI DESA SEI BULUH KECAMATAN PERBAUNGAN. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 7(1), 161-177.